

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Keluarnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris 2015	Henni Wahyuni	Persamaan dari jurnal dengan tulisan yang dibuat oleh penulis yaitu adanya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap <i>Paris Agreement</i> .	Pada jurnal tersebut memfokuskan terhadap kebijakan Presiden Trump untuk keluar dari <i>Paris Agreement</i> , dimana kesepakatan ini sangat bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Penelitian yang dibuat penulis fokus terhadap alasan yang

				melatarbelakangi kembalinya Amerika Serikat kedalam <i>Paris Agreement</i> .
2	<i>United States Rejoins the Paris Agreement in 2021 Compliance Theory</i>	Ahmad Jindan Pahlevi	Persamaan dari jurnal dengan tulisan yang dibuat oleh penulis yaitu adanya alasan yang melatarbelakangi kembalinya Amerika Serikat kedalam <i>Paris Agreement</i> .	Penelitian ini membahas alasan dibalik kembalinya Amerika Serikat kedalam <i>Paris Agreement</i> dengan menggunakan <i>Compliance Theory</i> . Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas mengenai alasan dibalik kembalinya Amerika Serikat kedalam <i>Paris Agreement</i> dengan

				menggunakan teori kepentingan nasional dan <i>Foreign Policy Restructuring</i> .
3	Persetujuan Barack Obama terhadap Paris Agreement 2015	Tedi Bagus Prasetyo Mulyo	Persamaan dari jurnal dengan tulisan yang dibuat oleh penulis yaitu membahas alasan Amerika Serikat dalam menyepakati <i>Paris Agreement</i> .	Jurnal ini membahas perihal persetujuan Barack Obama terhadap <i>Paris Agreement</i> dengan menggunakan teori poliheuristik. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas alasan yang melatarbelakangi Amerika Serikat bergabung kembali kedalam <i>Paris Agreement</i> , dengan menggunakan teori

				kepentingan nasional dan <i>Foreign Policy Restructuring.</i>
4	Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Paris Agreement Pada Masa Pemerintahan Joe Biden	Fuad Rizki Satriyo, Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D, Muhammad Faizal Alfian, S.IP., M.A.	Persamaan dari jurnal dengan tulisan yang dibuat oleh penulis yaitu menganalisa perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap <i>Paris Agreement</i> pada masa pemerintahan Joe Biden.	Jurnal ini membahas perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap <i>Paris Agreement</i> dengan menggunakan <i>green theory.</i> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas perubahan kebijakan luar negeri yang dianalisis menggunakan teori kepentingan nasional dan

				<i>Foreign Policy Restructuring.</i>
5	<i>President Biden and Climate Change: Policy and Issues</i>	Choi Hyeonjung	Persamaan dari jurnal dengan tulisan yang dibuat oleh penulis yaitu membahas kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden terhadap perubahan iklim	Jurnal ini hanya membahas mengenai sikap dan kebijakan Biden terhadap perubahan iklim tanpa menggunakan teori kepentingan nasional dan <i>Foreign Policy Restructuring.</i>

Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul “Keluarnya Amerika Serikat Dari Kesepakatan Paris 2015” yang ditulis oleh Henni Wahyuni dari *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* tahun 2018. Jurnal ini membahas perihal keluarnya AS terhadap Kesepakatan Paris 2015 pada tahun 2016. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Trump, dimana Trump melihat *Paris Agreement* bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat pada saat itu. Karena pada dasarnya Trump ingin mengembalikan kejayaan ekonomi AS, walaupun AS pada saat pemerintahan Obama banyak mengubah regulasi lingkungan global

hingga AS menjadi pionir dalam *Paris Agreement* pada tahun 2015 (Wahyuni, 2018).

Literatur kedua yaitu jurnal yang berjudul “*United States Rejoins the Paris Agreement in 2021 Compliance Theory*” yang ditulis oleh Ahmad Jindan Pahlevi pada tahun 2022. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* disebabkan oleh tiga faktor menurut *Compliance Theory* yang dijelaskan oleh Ronald B. Mitchell, yaitu efisiensi, kepentingan, dan norma. Selain itu, dalam jurnal ini pun menjelaskan bahwa terdapat faktor domestik yang berperan penting dalam mengubah dinamika dan sikap Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement*. Kepemimpinan Biden pun lebih terbuka terhadap perjanjian Internasional. Tingkat *Compliance* Biden terhadap *Paris Agreement* sangat tinggi, ia berkata bahwa ini menjadi akan rezim Internasional yang sangat bermanfaat bagi semua negara di dunia baik termasuk negara berkembang (Pahlevi, 2021).

Literatur ketiga yaitu jurnal yang berjudul “Persetujuan Barack Obama terhadap *Paris Agreement* 2015” yang ditulis oleh Tedi Bagus Prasetyo Mulyo pada tahun 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan persetujuan Barack Obama terhadap *Paris Agreement* dengan menggunakan teori poliheuristik mengacu pada analisis Amy Below. Kebijakan Presiden Obama dalam menyetujui Paris Agreement pada tahun 2015 disebabkan oleh ideologi politik liberalnya yang menekankan inklusifitas, sikap kooperatif, dan multilateralisme. Obama melakukan komitmen sebagai respon terhadap perubahan iklim melalui *Climate Action Plan* yang sebelumnya telah diimplementasikan pada tahun 2013. Hal tersebut diimplementasikan melalui tiga pilar utama yaitu, pertama dengan mereduksi emisi

gas rumah kaca domestik, kedua dengan meningkatkan daya asaptasi AS terhadap dampak perubahan iklim, dan yang ketiga adalah memimpin upaya global dalam merespon perubahan iklim melalui berbagai kerangka negosiasi (Bagus & Mulyo, n.d.).

Literatur keempat yaitu jurnal yang berjudul “Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam *Paris Agreement* Pada Masa Pemerintahan Joe Biden” yang ditulis oleh Fuad Rizki Satriyo, Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D, Muhammad Faizal Alfian, S.IP., M.A. pada tahun 2023. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan fokus kebijakan antara Trump yang antroposentris dan Biden yang ekosentris, dimana hal tersebut mempengaruhi penyebab terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement*. Selain itu, adanya faktor lingkungan dan teori hijau yang mempengaruhi aktor utama pengambil kebijakan dalam melakukan perubahan kebijakan luar negeri (Rizki Satriyo et al., 2023).

Literatur kelima yaitu jurnal yang berjudul “*President Biden and Climate Change: Policy and Issues*” yang ditulis oleh Choi Hyeonjung pada tahun 2021. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait perubahan iklim pada masa pemerintahan Presiden Biden. Kebijakan mengenai perubahan iklim dijadikan sebagai agenda utama dalam pemerintahan Presiden Biden. Hal ini kontras dan berbanding terbalik dengan presiden sebelumnya, yaitu Donald Trump. Presiden Biden telah membawa isu ini sejak masa kampanye dan berjanji untuk memulihkan kepemimpinan dalam kerjasama iklim internasional. Kepemimpinan Amerika Serikat dalam perjanjian

iklim internasional telah menjadi kepentingan nasional yang jauh lebih penting dari sebelumnya (Choi, 2021).

## **2.2. Kerangka Teoritis**

### **2.2.1. Teori Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional adalah tujuan dan ambisi suatu negara, baik dalam hal ekonomi, militer, atau budaya. Teori ini sangat penting bagi strategi negara dalam hubungan internasional. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain (Bainus & Rachman, 2018).

Selain itu, teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah negara berinteraksi dengan dunia internasional. Scott Burchill mengatakan bahwa motivasi suatu negara untuk menjalankan kebijakan politik luar negerinya adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional juga dapat menjadi penentu tindakan dan interaksi suatu negara yang mengarah pada pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Disisi lain, Charles Bread mengatakan bahwa motivasi suatu negara adalah kepentingan nasional yang mendasari tujuan dan aspirasi negara dalam menjalankan hubungan internasional. Para peneliti menggunakan gagasan kepentingan nasional untuk menggambarkan dan menganalisis alasan, motivasi, atau justifikasi utama yang mendorong suatu negara berperilaku atau bertindak dengan negara lain (Mardiana et al., 2020).

Dalam tulisan ini, penulis meneliti perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Amerika

Serikat dalam menangani permasalahan iklim yang ada di dalam negaranya. Selain itu, Amerika Serikat pun ingin membangun kembali kredibilitasnya dalam perjanjian iklim internasional.

### **2.2.2 Kebijakan Luar Negeri**

Secara konseptual, kebijakan luar negeri sering dipahami sebagai tindakan otoritatif yang diambil atau berkomitmen untuk diambil oleh pemerintah untuk mempertahankan aspek-aspek yang diinginkan dari lingkungan internasional atau mengubah aspek-aspek yang tidak diinginkan. Kebijakan luar negeri dibentuk dengan adanya orientasi tujuan yang jelas untuk memecahkan masalah, meraih kepentingan nasional, atau mendorong adanya perubahan dalam lingkungan internasional. Secara singkat, kebijakan luar negeri terdiri dari pernyataan dan tindakan yang diambil oleh subjek negara dalam hubungannya dengan aktor eksternal lainnya, baik negara maupun non-negara (Dugis, n.d.).

K. J. Holsti mengemukakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah gagasan atau tindakan yang diambil oleh para pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah atau mendorong adanya perubahan. Hal ini dapat berupa perilaku, kebijakan, atau tindakan negara ataupun aktor non-negara di lingkungan internasional (Holsti, 2016a). Holsti menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh terjadinya reorientasi kebijakan luar negeri negara tersebut dari suatu masa pemerintahan menuju ke suatu masa pemerintahan selanjutnya, baik reorientasi tersebut akan menimbulkan terjadinya restrukturisasi kebijakan luar negeri negara tersebut atau tidak sama-sama akan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara (Gian, 2020).

Dalam tulisan ini, penulis meneliti perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden, dimana kebijakan mengenai perubahan iklim dijadikan sebagai agenda utama dalam pemerintahan Presiden Biden. Hal ini menjadi respon dan sikap yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional negaranya dalam sistem internasional yaitu untuk menangani permasalahan iklim yang ada di negaranya dan membangun kembali kredibilitasnya dalam perjanjian iklim internasional.

### **2.2.3. Rezim Internasional**

Berbagai fenomena, permasalahan, serta tantangan yang terjadi dalam tatanan internasional mengharuskan negara-negara untuk melakukan aksi bersama dalam menyelesaikannya. Kerja sama yang terjalin antar negara sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam tatanan hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral. Penyelesaian bersama yang dilakukan melalui kerja sama antar negara-negara tersebut berakhir dengan kesepakatan dan perjanjian dengan seperangkat aturan yang mengikat bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya, dengan kata lain yaitu rezim internasional.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori rezim internasional yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner dalam tulisannya yang berjudul “*International Organization and the Study of World Politics*”, bahwa rezim internasional merupakan seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik secara langsung (eksplisit) maupun tidak langsung (implisit) dimana harapan para aktor yang tergabung bertemu dalam satu isu

hubungan internasional tertentu (Katzenstein et al., 1998). Dengan kata lain, rezim merupakan suatu arena dimana berbagai negara melakukan kerja sama dan mengadopsi kebijakan yang sama untuk mengatasi tantangan dan masalah tertentu yang sedang terjadi.

Dalam tulisan ini, penulis meneliti perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden. *Paris Agreement* sebagai rezim internasional bertujuan untuk mengatasi permasalahan iklim yang terjadi di dunia dengan menurunkan suhu bumi dibawah 2° C dan membatasi pemanasan global menjadi 1,5° C. Amerika Serikat sebagai negara penghasil emisi karbon kedua terbesar di dunia, pada masa pemerintahan Joe Biden kembali bergabung kedalam *Paris Agreement* karena adanya urgensi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada di negaranya. *Paris Agreement* pun memiliki prinsip, norma, dan aturan untuk mengarahkan tindakan negara-negara yang tergabung di dalamnya, termasuk Amerika Serikat, agar dapat mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan laju perubahan iklim global.

#### **2.2.4. Foreign Policy Restructuring**

Reorientasi kebijakan luar negeri suatu negara dapat berdampak terhadap hubungan antar satu negara dengan negara lainnya. Adanya reorientasi kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. K.J. Holsti dalam bukunya yang berjudul “*A Pioneer in International Relations Theory, Foreign Policy Analysis, History of International Order, and Security Studies*” menjelaskan bahwa ketika suatu negara mengubah arah dan prioritas dalam hubungannya dengan negara lain, maka hal

tersebut dapat dikatakan sebagai reorientasi kebijakan luar negeri. Hal ini dapat mencakup pergeseran dari satu kelompok negara ke kelompok negara lain, ataupun pergeseran tujuan diplomasi atau aliansi dan kemitraan strategis (Holsti, 2016a).

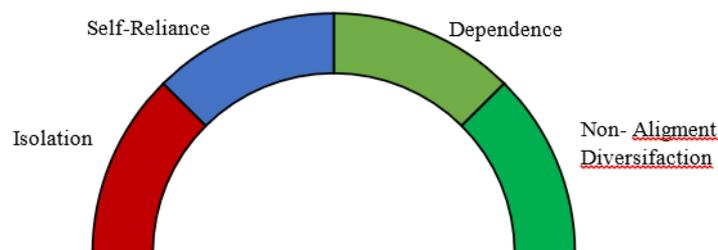
Selain itu, George Modelski mendefinisikan reorientasi kebijakan luar negeri sebagai salah satu aspek penting dari pendekatan suatu negara terhadap sistem internasional. Reorientasi kebijakan luar negeri suatu negara dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan sistem internasional, perubahan kepentingan nasional, atau perubahan kepemimpinan politik. Dalam hal ini, menurut Modelski negara-negara pun dapat mengubah pendekatan mereka terhadap sistem internasional sebagai akibat dari peristiwa seperti konflik, krisis ekonomi, ataupun karena adanya kemajuan teknologi. Para pengambil keputusan juga menjadi aspek penting dalam proses terjadinya reorientasi kebijakan luar negeri, terutama apabila adanya kepemimpinan baru yang memiliki tujuan yang berbeda dari kepemimpinan sebelumnya. Reorientasi kebijakan luar negeri juga dapat disebabkan oleh perubahan kepentingan nasional seperti karena adanya peningkatan ancaman keamanan ataupun untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi (Modelski George, 1962).

Restrukturisasi kebijakan luar negeri dapat terjadi sebagai tanggapan atas perubahan dalam sistem internasional, perubahan kepentingan nasional, ataupun perubahan tujuan domestik. Reorientasi yang dimaksud oleh Holsti adalah 'kecenderungan' pembuat kebijakan untuk merestrukturisasikan hubungan negaranya dengan negara lainnya. Hubungan dengan negara lain yang dimaksud oleh Holsti tidak sebatas sebuah hubungan yang terjadi secara bilateral, melainkan juga segala level dalam sistem internasional, seperti level multilateral di mana suatu

negara berhadapan dengan negara-negara lainnya dalam suatu organisasi internasional (Gian, 2020).

Sedangkan menurut K.J. Holsti dalam bukunya “*Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World*” mengemukakan bahwa dalam restrukturisasi kebijakan luar negeri suatu negara terdapat empat jenis tipologi yaitu *Isolation, Self-Reliance, Dependence, Non-Alignment Diversification*. Dalam mengklasifikasikan reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negeri, maka dapat dilihat melalui perubahan secara dasar dalam tingkat keterlibatan dalam lingkup eksternal, kebijakan-kebijakan terkait jenis dan sumber penetrasi eksternal, arah atau pola keterlibatan eksternal, serta komitmen diplomatis dan militer. Jenis-jenis tersebut tidak dapat menutupi segala bentuk dari kebijakan luar negeri. Maka dari itu, perlu adanya indikasi dalam arah kebijakan luar negeri yang ditunjukkan melalui aksi, transaksi, dan komitmen suatu negara dalam melakukan reorientasi dan restrukturisasi (Holsti, 2016b).

**Gambar 2. 1 Tipology Foreign Policy Restructuring**



1) *Isolation*

Negara-negara dalam kategori ini biasanya memiliki hubungan luar negeri yang sangat rendah, memiliki kebijakan yang cukup tertutup, dan percaya bahwa kebijakannya lebih eksklusif daripada kebijakan negara lain sehingga negara-

negara dalam kategori ini membatasi hubungan mereka dengan negara di sekitarnya. Kemudian, negara-negara yang termasuk dalam kategori ini juga cenderung menekankan kemandirian dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mereka. Negara-negara ini sangat bergantung pada sumber daya domestik yang dimilikinya dan kurang bergantung pada bantuan internasional atau kerja sama internasional lainnya (Holsti, 2016b).

Dalam tulisan ini, penulis meneliti perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden. Namun, perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut terlihat dengan adanya perubahan dari kecenderungan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Trump yang mengarah pada *Isolation* dengan diterapkannya “America First” pada kebijakan luar negerinya.

## 2) *Self-Reliance*

Negara-negara dalam tipologi ini memiliki karakteristik yang sebanyak mungkin bergantung pada sumber daya dan kemampuan internalnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, politik, keamanan, dan sosialnya dengan mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, negara-negara dalam tipologi ini cenderung mengambil kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan industri dan sektor ekonomi domestik dengan menerapkan tarif, subsidi, dan kebijakan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negerinya. Sementara hubungan perdagangan, diplomatik, dan budaya terus berlangsung dengan negara lain, selama hubungan ini tetap sejalan dan relevan dengan kepentingan nasional negaranya. Negara-negara ini menghindari komitmen militer yang melibatkan kondisi ketergantungan, misalnya rentan terhadap berhentinya

pengiriman senjata, atau menghindari dukungan terhadap kepentingan negara lain yang tidak sejalan dengan kepentingan negaranya, serta tingkat transaksi yang masih rendah (Holsti, 2016b).

Dalam tulisan ini, penulis meneliti perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden. Namun, perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut terlihat dengan adanya perubahan dari kecenderungan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Trump. Meskipun kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump mengarah pada *Isolation*, namun pemerintahan Trump juga memiliki kecenderungan kebijakan luar negeri yang mengarah pada *Self Reliance* karena adanya kemandirian yang ingin dicapai oleh pemerintah Amerika Serikat pada saat itu. Hal ini dapat dilihat dari Amerika Serikat yang memutuskan untuk merealisasikan program *America First Energy Plan* (AFEP).

### 3) *Dependence*

Menurut tipologi ini, negara yang *dependence* adalah negara yang bergantung pada negara lain dalam berbagai hal, terutama dalam hal ekonomi dan kebijakan. Kebijakan negara dalam tipologi ini sangat bergantung pada negara atau kawasan. Selain itu, negara *dependence* sangat bergantung pada peningkatan ekonomi mereka melalui ketergantungannya terhadap bantuan luar negeri, pinjaman internasional, ataupun investasi asing. Ketergantungan seperti ini tentunya dapat membuat negara rentan terhadap perubahan kebijakan negara mitra, perubahan ekonomi global, dan masalah global lainnya yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan stabilitas negara. Negara dengan karakteristik ini mempunyai aksi dan hubungan dengan lingkup eksternal bersifat cukup tinggi, dan dikarakterisikan

memiliki kecenderungan untuk berhubungan dengan negara atau kelompok yang serupa (Holsti, 2016b).

Dalam hal ini, penulis meneliti bahwa sikap Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* lebih cenderung menjadi bagian dari kerangka kerja global yang melibatkan banyak negara dan inisiatif nasional untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya *dependence* atau ketergantungan tunggal pada satu perjanjian internasional dalam pengambilan kebijakan, baik pada masa Obama, Trump, maupun Biden.

#### 4) *Non-alignment diversification*

Negara-negara dalam kategori ini merupakan negara yang menunjukkan keterbukaan terhadap negara-negara lain. Meskipun demikian, negara-negara tersebut cenderung melakukan penolakan dan secara ketat menghindari untuk bergabung dalam aliansi militer atau blok kekuatan tertentu yang dapat melibatkan mereka dalam suatu konflik atau hubungan yang ketat dengan negara lain karena mereka hanya mencari kemitraan ekonomi, politik, dan sosial dengan berbagai mitra dari negara lain untuk menghindari ketergantungan pada suatu negara atau kawasan tertentu. Keterbukaan terhadap pihak eksternal sering kali terlihat, tetapi negara tetap berupaya untuk mempertahankan keseimbangan dalam keragaman antara jumlah dan jenis pihak asing yang terlibat. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini juga lebih cenderung mendukung dialog diplomatik serta melakukan mediasi dan upaya damai dalam penyelesaian konflik internasional (Holsti, 2016b).

Dalam tulisan ini, penulis meneliti perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden. Perubahan

tersebut jika dilihat dari teori *Foreign Policy Restructuring* mengarah pada *Non-Alignment Diversification*, dimana Amerika Serikat melakukan langkah diplomatik dalam menyelesaikan permasalahan iklim yang ada di neganya dengan kembali kedalam perjanjian iklim internasional yaitu *Paris Agreement*.

### **2.3. Asumsi Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, postulat lama, dan kerangka teoritis yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis membuat sebuah asumsi yang perlu diuji kebenarannya. Asumsi yang perlu diuji kebenarannya adalah sebagai berikut **“Perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat bergabung kembali kedalam *Paris Agreement* mengarah kepada *Non-Alignment Diversification* berdasarkan empat faktor terjadinya restrukturisasi kebijakan luar negeri, hal ini dilatarbelakangi oleh kepentingan nasionalnya dalam menyelesaikan permasalahan iklim yang ada di negaranya dan mengembalikan kredibilitas Amerika Serikat dalam perjanjian iklim internasional”**

## 2.4. Kerangka Analisis

